

Daftar Isi

Gambaran Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 1990 s/d 2006	
Moch. Lutfie Misbach.....	1–7
Peran Civic Diplomacy dalam Mendukung Investasi Kapital dan Strategi Simbolik Indonesia	
June Cahyaningtyas	8–16
Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri	
Citra Hennida	17–23
Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB	
Wulan Purnamawati.....	24–29
Formula Kelembagaan Pemerintah Kota: Studi Evaluasi Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	
Alisjahbana.....	30–35
Jawa di Mata Prancis: Analisis terhadap Roman <i>Voyage Autour du Monde Java, Siam & Canton</i> Karya Comte Ludovic de Beauvoir	
Wening Udasmoro	36–41
Variasi Biologis Populasi Manusia di Pulau Jawa: Analisis Kranimetri	
Fitriya Niken Ariningsih	42–48
Peran Faktor Sosial-Ekonomi dan Gizi pada Tumbuh Kembang Anak	
Myrtati D. Artaria.....	49–58
Analisis <i>Framing</i> Berita Poligami di Media Massa	
Moch. Syahri.....	59–66
Hubungan antara Jenis Media yang Digunakan dalam PEMILU 2004 dengan Perilaku Memilih	
Sri Zul Chairiyah.....	67–75
Sistem Pariwisata di Agropolitan Batu	
Sri Endah Nurhidayati	76–85
Diskursus Gender di Pondok Pesantren: Pandangan Santri Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kitab Kuning	
Khaerul Umam Noer	86–94

Peran Civic Diplomacy dalam Mendukung Investasi Kapital dan Strategi Simbolik Indonesia

June Cahyaningtyas¹

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

This article elaborates the importance of image and brand for Indonesian diplomacy. The positive image and brand most likely put up the strength for the diplomacy. An image can be constructed or re-constructed by investing an effective symbolic capital and strategy through civic diplomacy. In this context, the government works as the actor of diplomacy, along with the participation of the people and the media, in chorus. Identification of Indonesian symbolic capital and strategy in this article will be carried by implementing the Field, Practice and Habitus (FIPH) Approach of Pierre Bourdieu. By noting the importance of habitus in FIPH Approach, this writing attends to conclusion that there is a call for a paradigm shift collectively among Indonesians in order to make an effectual and efficient diplomatic practice and discourse in international arena.

Key words: *image, civic diplomacy, symbolic capital, symbolic strategy, habitus.*

Bagaimana konstruksi *image* (*image-building*) mempengaruhi diplomasi negara bangsa di luar negeri? Siapa yang berperan dalam produksi dan reproduksi *image* Indonesia di luar negeri? Bagaimana mengelola *image* dan *brand* agar bisa menjadi kekuatan diplomasi RI di luar negeri? Ketiga pertanyaan itu merupakan pertanyaan kunci yang akan dibahas dalam makalah ini, dengan fokus utama pembahasan pada pertanyaan ketiga. Pembahasan akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan *Field, Habitus, dan Practice* ("FIPH approach") dari Pierre Bourdieu.

Istilah "FIPH approach" diperkenalkan Anna Leander dalam "*The 'Real Politic' of Reason: Thinking International Relations through Fields, Habitus and Practice*" (2006). Leander menegaskan kontribusi Bourdieu bagi pemekaran pendekatan *Constructivism* dalam HI melalui metode praksis sosial yang dibangunnya. Sedikitnya ada tiga alasan yang mendukung pentingnya pendekatan FIPH Bourdieu bagi *Constructivism* dalam HI: (1) FIPH menawarkan basis pemahaman mengenai peran *power* dalam konstruksi makna secara sosial; (2) FIPH memberi strategi tindakan sebagai bagian dari pemahaman yang luas mengenai prinsip agensi; dan (3) FIPH mendorong terjadinya refleksivitas (*transdisiplin*) bagi kacamata politik HI.

Tesis yang hendak diajukan dalam tulisan ini adalah (1) perlunya investasi kapital² dan efektivitas strategi simbolik guna mendukung penguatan *image* Indonesia di luar negeri melalui diplomasi, dan (2) diplomasi baru berjalan efektif bila ketiga unsur pemerintah, masyarakat, dan media dalam tatanan masyarakat demokratis tampil sebagai agen yang memperjuangkan *image* positif Indonesia secara simultan melalui praktik dan wacana yang dilakukannya (*civic diplomacy*).

Pembahasan

Menjawab pertanyaan pertama mengenai pentingnya *brand* bagi diplomasi negara di luar negeri sebenarnya bisa dilakukan dengan menarik buah dari pengalaman kegagalan Amerika Serikat (AS). Peristiwa 9/11 meninggalkan pelajaran bahwa AS menjadi korban dari *kesembronoan* pemerintah AS dalam mengelola aset *brand* yang dimilikinya dengan membiarkan refleksi *hyperpower* yang rakus dan diplomasi unilateral yang imperialistik, sehingga menuai antipati dan kemarahan yang gelap mata. Demokrasi dan individualisme, etika protestan dan pasar bebas yang seharusnya menjadi sumber kekuatan simbolik AS, kemudian disadari sebagai operasi kekerasan simbolik (*symbolic violence*) AS

¹ Korespondensi: J. Cahyaningtyas. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran", Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55283 Telp: (0274) 7852600. E-mail: brillelune@yahoo.com

² Istilah kapital di sini akan digunakan secara bergantian dengan istilah modal, tanpa mengubah muatan makna yang dikandungnya. Begitu pun halnya dengan istilah 'image' yang akan digunakan secara bergantian dengan 'citra'

terhadap dunia. Kegagalan *brand* Amerika tidak hanya menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri negaranya, tapi juga kegagalan industri perdagangan dan jasa Amerika di luar negeri (Frost, 2007).

Pengalaman Amerika meninggalkan satu pelajaran berharga bahwa *brand* bukan sesuatu yang bersifat lahiriah dan mengada begitu saja, melainkan sesuatu yang sengaja dikelola (direkayasa) untuk memenuhi tujuan tertentu (penciptaan *image* tertentu). Dalam konteks ini, *brand* merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan, dan bahasa merupakan artikulasi dari upaya penyampaian gagasan tentang *image* yang ingin dibangun di dalam pesan tersebut.

Agency & Social Practice: Diplomasi Sebagai Praksis Sosial

Brand Indonesia lahir dari seperangkat praktik yang diselenggarakan oleh agen-agen pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik individual maupun kelompok. Bourdieu (dalam Jenkins, 2004: 98-101) mendefinisikan praktik sebagai aktivitas yang terkontekstualisasi dalam gagasan ruang dan waktu, bersifat mengalir, spontan dan, karenanya, tidak mesti diorganisir dengan sepenuhnya sadar. Unjuk rasa pendudukan lahan, demonstrasi jalanan, suap (*bribery*), penggelapan (*mark-up*), penebangan hutan, penyelundupan kayu ilegal, penjualan pulau-pulau kecil di nusantara, kerusakan antar etnik atau warga, dan antri minyak tanah merupakan sebagian di antara praktik keseharian yang tampil dalam tayangan berita Seputar Indonesia. Inilah artikulasi bahasa, sebuah ritual dalam konteks kehidupan sehari-hari, yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena cenderung menetap dan berulang, rekaman praktik keseharian masyarakat ini terkesan impulsif dan alamiah. Tak heran jika gagasan yang disampaikan menjadi demikian mengakar mengenai citra negara Indonesia yang miskin dan koruptif dengan masyarakat yang lemah akal, pemalas dan oportunis.

Media yang berperan dalam proses pengkonstruksian tanda dan makna dari praktik yang berlangsung. Media, bahkan kerap menjadi pengarah tindakan masyarakat melalui peran *steering interest* yang dijalankannya. Appadurai (2002) telah mengingatkan bahwa persoalan representasi saat ini tidak lagi dimonopoli oleh aktor negara saja. Ketika media berperan sebagai *interlocutor* dalam proses diplomasi aktor-aktor non-negara, maka praktik diplomasi pun secara otomatis menyebar di mana setiap orang terlibat sebagai aktor bagi diplomasi Indonesia.

Melalui media pula, *spin of information* mengenai kualitas dan kinerja pemerintah disorot dan didokumentasikan. Tanpa dukungan media, sulit bagi pemerintah menyampaikan keberhasilan dari tugas dan fungsi yang dijalankannya, meski dengan mengandalkan Departemen Komunikasi dan Informasi yang didirikan khusus untuk menjalankan peran humas yang dibutuhkannya. Sejauh mana media mengonstruksikan negara, termasuk di dalamnya relasi kuasa antara pemerintah dengan warga negaranya, menentukan sejauh mana citra pemerintah, mewakili institusi negara. *Positioning* sebuah negara dalam rangka membangun *brand* Indonesia, dengan demikian, bisa dicapai melalui tindakan diplomasi yang diselenggarakan secara simultan oleh ketiga unsur pembentuknya: masyarakat, media, di samping, tentu saja, pemerintah. Ketiga unsur inilah yang bertanggung jawab atas produksi dan reproduksi *image* Indonesia dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan dan pergaulannya di luar negeri.

Simbiosis di antara pemerintah, masyarakat dan media menegaskan pemaknaan atas diplomasi saat ini: diplomasi adalah relasi sosial yang dibangun di atas landasan kepentingan dan kekuasaan.

Practice: Praktik Diplomasi RI

Merujuk pandangan Bourdieu, praktik diplomasi berlangsung di atas ranah sosial (*field*) yang sarat dengan pertarungan nilai dan kekuasaan. Ranah sosial itu tidak lain merupakan pasar wacana di mana *image* diproduksi dan direproduksi; wacana dominan dikekalkan dan menjadi status *quo*, sedangkan wacana tandingan berusaha hidup dan bertahan dengan terus melancarkan agitasi terhadap demonologi *image*.

Di atas ranah kontestasi itulah, wacana positif mengenai Indonesia sebagai wacana tandingan terhadap wacana dominan harus senantiasa diperjuangkan. Wacana dominan menyuarakan bahasa yang sewarna mengenai Indonesia: negara teroris, tempat di mana kekerasan menjadi sesuatu yang banal dan fundamentalisme menemukan ruang hidupnya. Di luar itu, *image* buruk birokrasi dalam negeri yang diasosiasikan dengan lemahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya penegakan hukum, *mismanagement* bencana, dan korupsi menambah berat beban yang ditanggung diplomasi Indonesia di luar negeri.

Harus disadari bahwa betapa pun buruknya *image* Indonesia dalam wacana utama (*doxa*) yang

berkembang saat ini, upaya menghadirkan wacana dan praktik tandingan (*heterodoxa*) bukanlah tidak mungkin. Bahkan upaya tanpa henti untuk mengkonternya memperlihatkan sebetulnya resistensi yang diharapkan mampu mematahkan afirmasi terhadap kebenaran *image* buruk Indonesia di luar negeri.

Politik internasional saat ini bertransformasi menjadi ranah publik di mana negara memperjuangkan *image* untuk memenuhi kebutuhan eksistensialnya. Menyadari bahwa diplomasi saat ini tidak lain merupakan perwujudan praktik pencitraan dalam sebuah pasar citra yang kompetitif, maka untuk memenangkan perjuangan mematahkan *image* buruk Indonesia di luar negeri diperlukan adanya dua hal, yakni kapital simbolik dan efektivitas strategi simbolik. Pengalaman AS sebagaimana disampaikan di muka memperlihatkan bahwa kapital simbolik yang besar tetapi jika tidak diarahkan dalam sebuah strategi yang efektif maka hasil yang diperoleh adalah inflasi simbolik. Piliang (2005) mengatakan, dalam konteks Indonesia, yang terjadi bukanlah inflasi simbolik, melainkan defisit simbolik atau degradasi simbolik.³

Kapital Simbolik Diplomasi Indonesia

Kapital simbolik mengacu pada pengertian aktivasi kewenangan seseorang melalui tindakan komunikasi yang dilakukannya. Tindakan komunikasi itu sendiri dilihat sebagai tindakan bermakna dari pelaku-pelaku sosial yang melibatkan dimensi-dimensi simbolis dan berlangsung dalam konteks situasi dan kondisi yang melingkupi derajat kewenangannya dalam berinteraksi.

Bourdieu mendefinisikan kapital atau modal simbolik dalam relasinya dengan modalitas yang lain, seperti modal finansial, modal budaya, modal agama, dan modal intelektual. Pandangan ini memiliki kemiripan dengan konsep *soft power* dari Joseph S. Nye (1990). Nye mengklasifikasikan dua sumber kekuatan negara, yakni (1) *behavioural power*, yakni kemampuan memperoleh hasil yang diinginkan melalui *hard/command power* dan *soft power*; dan (2) *resource power*, yakni penguasaan sumber daya yang diasosiasikan dengan kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, *resource power* diperlukan untuk menerapkan *hard* dan *soft power* (Nye, 1990: 191).

Berbeda dengan Nye, Bourdieu melihat kompleksitas hubungan yang lebih rumit dalam hubungan gugus modal dengan kondisionalitas yang melatari posisi negara sebagai pemilik modal. Dalam konteks ini, Bourdieu melihat kondisionalitas aktor sebagaimana Michel Foucault melihat beroperasinya *power*. Menurut Foucault (dalam Gordon, 1980), *power* bersifat relasional, *multi-directional*, dan produktif. Mekanisme paling efektif dari kekuasaan adalah sifat produktifnya, yang bekerja melalui metode *disciplinary* yang bersifat seduktif. Seperti halnya *disciplinary power* dari Foucault, kekuatan simbolik (*symbolic power*) dari Bourdieu beroperasi melalui mekanisme pendisiplinan yang halus, tidak terlihat, seperti halnya bujukan, dan karenanya mampu mengubah struktur dan konsep berpikir dan bertindak seseorang.

Kekuatan simbolik tidak hadir dengan sendirinya. Ia merupakan hasil investasi dan strategi modal-modal pendukung kebermaknaan yang menciptakan pengakuan dari pihak luar. Kekuatan simbolik hadir karena kesadaran akan bermanfaatnya intrusi nilai-nilai tertentu dalam pola-pola tindakan yang ingin dihadirkan. Kekuatan simbolik adalah manifestasi modal simbolik yang berhasil memperoleh pengakuan atau legitimasi. Makna modal simbolik didefinisikan sejauh ia berhasil mengaktualkan daya-daya produktif yang dimilikinya menjadi praksis sosial (dari subyek pemilik modal) dan pengakuan (dari subyek luaran). **Dus, produksi dan reproduksi modal simbolik menjadi kekuatan simbolik tercapai melalui investasi dan strategi.** Modal simbolik menjadi kekuatan simbolik jika ada pengakuan dari luar atas kompetensi yang dimilikinya dalam hal praktik, tafsir, penilaian dan legitimitas wacana yang dibangun.

Sumber kekuatan simbolik bangsa Indonesia bisa dirujuk dari tiga kapital utama: Islam, demokrasi, dan kapital budaya (*cultural capital*).

Islam

Secara empirik, demografi masyarakat Indonesia menunjukkan kuantitas sumber daya muslim yang sangat besar di salah satu dari dua negara di dunia (lainnya Pakistan). Akan tetapi, mendasarkan kuantitas penduduk muslim sebagai basis penilaian atas potensi Islam di Indonesia tentu sangat naif bila tidak didasari oleh atribut penilaian lainnya.

³ Baik inflasi simbolik maupun degradasi simbolik memperlihatkan kegagalan efektivitas strategi simbolik, perbedaannya terletak pada besar/kecilnya kapital simbolik yang dikuasai, yang menentukan sejauh mana kewenangan itu dimiliki sebagai basis dari tindakan komunikasi seseorang.

Dalam konteks diplomasi luar negeri, keanggotaan Indonesia dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan atribusi bahwa Indonesia merupakan negara muslim di Asia Tenggara mendukung bangunan wacana mengenai modalitas Islam di Indonesia.

Islam sendiri hadir dalam berbagai ekspresi keseharian di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hingga kini, nafas Islam masih dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat melalui ritual, seremoni dan ekspresi budaya lainnya. Di Jawa Tengah, *Grebeg Maulud* diselenggarakan dalam rangka perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW sedangkan peringatan *satu suro* merupakan peringatan satu Muharram dalam kalender Hijriah. Hari *Asyura* (10 Muharram) diperingati melalui *do'a*, puasa dan renungan oleh sebagian muslim di Indonesia sebagai sebuah ibadah tambahan (*sunnah*). Di Bengkulu, hari *Asyura* diperingati dengan prosesi *tabut*, sedangkan pada sebagian besar komunitas Syiah dilakukan melalui *maqtal* Hussein, *ma'tam*, dan *ta'zieh*. Ekspresi budaya yang lebih jamak seperti *slametan* (Jawa) atau *kanduri* (Aceh) menunjukkan adopsi dari kebiasaan masyarakat Arab yang menjadi bagian dari kultur masyarakat lokal di Indonesia.

Selain terwujud dalam ekspresi budaya tradisional, merasuknya institusi Islam dalam sistem perbankan, pelayanan kesehatan dan jasa pendidikan dewasa ini menunjukkan asimilasi yang lebih dalam dari Islam dengan identitas modern di Indonesia. Identitas baru ini mulai ditumbuhkan melalui pendirian institusi pendidikan (seperti Paramadina (1986)) dan bank berbasis syariah (Bank Muamalat (1993)) yang mampu menarik dukungan luas serta menyalurkan ekspresi dan identitas baru Islam di kalangan menengah ke atas. Mark R. Woodward (2001) bahkan menilai bahwa identitas Islam yang baru ini pada akhirnya mengkristal menjadi identitas politik yang turut berperan dalam upaya menggulirkan reformasi.

Dalam konteks *nation-building*, sejarah pra-kemerdekaan menempatkan Islam sebagai bagian dari kekuatan perlawanan menentang penjajah. Di masanya Islam diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Meskipun demikian, (organisasi) Islam sempat pula menjadi kendaraan politik yang dimanfaatkan kelompok penguasa. Islam menjadi penanda politik yang membedakan pemeluknya dari pemeluk agama lain. Kategori Islam/bukan-Islam (murtad) dan Islam (sebagai beragama)/ateis (tidak beragama) menjadi basis klasifikasi evaluatif yang berlaku bagi kelas-

kelas sosial dalam masyarakat Orde Baru (Raillon, 1994).

Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan Farid Wajidi, upaya merekonstruksi sejarah kalam umat Islam di masa lalu dan memperjuangkan hak politik Islam yang dikebiri pemerintah Orde Baru sesungguhnya menunjukkan rekonsiliasi warga negara muslim-non muslim dalam bentangan sejarah Orde Baru. Hal ini sekaligus menegaskan intensi yang kuat untuk berdamai dengan sejarah dan dimulainya kebangkitan Islam sebagai kekuatan politik. Beragam partai yang mengusung bendera Islam saat ini merupakan salah satu petunjuk atas pluralitas interpretasi terhadap Islam di Indonesia. Pergulatan Islam normatif dengan Islam kultural bahkan masih diimbui wacana Islam liberal yang memperkaya katalog keislaman di Indonesia. Meskipun mengandung sejumlah kontroversi, hadirnya Islam liberal memberi perspektif baru dan segar mengenai kontekstualisasi tradisi Islam dan modernitas di tengah masyarakat Indonesia.

Pergulatan identitas dan wacana keislaman dalam sejarah *nation-state* Indonesia mendorong Islam untuk senantiasa berhampiran pada kondisionalitas masyarakat dan, karenanya, bersifat terbuka. Tidak akan dijumpai satu wajah tunggal Islam di nusantara. Woodward (2001), misalnya, membedakan peta kekuatan Islam di Indonesia ke dalam lima jenis, yakni (1) *Indigenized Islam*, (2) *Traditional Sunni Islam*, (3) *Islamic Modernists*, (4) *Islamist*, dan (5) *Neo-Modernism*. Peter G. Riddle (2002) membagi Islam di Indonesia ke dalam tipologi: (1) *Neo-Modernist Liberal*, (2) *Modernist Reformist*, (3) *Traditionalist*, dan (4) *Islamist*. Karakter Islam di Indonesia yang plural, bukan monolitik, inilah yang menjadikan Islam berpotensi sebagai kekuatan simbolik bangsa ini. Tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan toleransi di antara keragaman wajah Islam itu sendiri dan menjadikan Islam sebagai sebuah rumah budaya bagi hidupnya wacana agama yang plural dan toleran di Indonesia.

Demokrasi

Pengamatan Harold Crouch terhadap demokratisasi di Indonesia membawanya pada penilaian yang positif dan optimis. Crouch melihat kesinambungan upaya pemerintah pasca reformasi untuk membangun sistem demokrasi konstitusional. Namun Crouch mencermati bahwa upaya mendorong demokratisasi tidak bisa dilakukan jika tanpa disertai kedewasaan

berpolitik para pelaku di dalamnya. Di sinilah jiwa demokrasi itu sesungguhnya bisa dijumpai.

Di Indonesia, di sinilah tantangan demokrasi yang sesungguhnya: penghayatan akan prinsip moral dan budaya demokrasi itu sendiri. Ketika tuntutan akan terciptanya masyarakat sipil demikian tinggi, pada saat yang bersamaan *trust* sebagai modal sosial tidak pernah dikembangkan dan dibudayakan sebagai fundamennya. *Trust* yang rendah, misalnya, tampak dari lemahnya kepercayaan yang diberikan pada kompetensi pemerintahan saat ini. Media massa yang harusnya bertindak sebagai katalisator informasi kerap terjebak dalam upaya mendorong munculnya *distrust* di antara masyarakat terhadap pemerintah ataupun sebaliknya serta *distrust* di antara kelompok-kelompok di masyarakat sendiri. Di sisi lain, justru kecepatan informasi dan pilihan pesan yang disampaikan oleh medialah yang sejauh ini mendorong pewacanaan, keterbukaan dan bahan perbandingan untuk dilakukan *check* dan *recheck*. Kemerdekaan pers sebagai bagian sekaligus perangkat demokrasi mungkin tidak bisa menghapuskan *distrust* di masyarakat. Tetapi, media memberi harapan bagi proses pendewasaan diri melalui iklim keterbukaan di mana *distrust* dipreteli dan *trust* dibangun lewat dialog dan rekonsiliasi.

Perlu digarisbawahi barangkali adalah simpulan Abdul Karim Soroush, seorang intelektual liberal asal Iran, bahwa demokrasi adalah antitesis terhadap liberalisme yang dipahami sebagai kediktatoran masyarakat atau bahkan pemerintahan minoritas atas nama mayoritas: “karena prinsip *a priori* demokrasi di mana saja adalah moral, maka demokrasi tidak akan berhasil tanpa komitmen terhadap ketentuan moral. Menghormati kehendak mayoritas dan hak-hak orang lain, keadilan, simpati, dan kepercayaan (*trust*) adalah termasuk di antara prinsip-prinsip demokrasi yang paling penting” (Soroush, 2002, 222). Inilah sesungguhnya tugas besar dari pendidikan di negeri ini: menciptakan, sebagaimana dikatakan Romo Mangun (1999), “manusia dan budaya pasca-Indonesia yang berpikir multidimensional serta bertindak dialektis dan dialogis”, yang sejalan dengan visi membangun rumah demokrasi di Indonesia.

Kapital Budaya (*Cultural Capital*)

Raymond Williams (dalam John Storey, 1993) menawarkan tiga definisi budaya yang sangat luas, yakni (1) budaya mengacu pada “suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual dan estetis”; (2) budaya juga berarti “pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu”, termasuk dalam konteks ini adalah praktik-praktik budaya atau kebiasaan yang mengindikasikan budaya-yang-hidup (*lived culture*); dan (3) budaya bisa pula merujuk pada “karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik” atau praktik kebermaknaan dari teks-teks budaya, seperti budaya pop.

Sesuai dengan pengertian Williams di atas, maka budaya mencakup karya kreatif yang lahir dari tradisi intelektual dan estetis di sebuah bangsa pada lintasan masa tertentu, termasuk di dalamnya kebiasaan-kebiasaan dan praktik budaya keseharian, yang dipelihara sebagai identitas kultural (sebuah bangsa atau lokalitas masyarakat tertentu) atau sebaliknya dikonfrontasikan dengan hadirnya ekspresi budaya baru yang bersifat tandingan. Selanjutnya, modal budaya merujuk pada dua bentuk, yakni (1) kapital budaya dan pusaka (*culture and heritage*)⁴; (2) kapital intelektual.

Kapital budaya dan pusaka Indonesia mendapat pengaruh yang kaya dari unsur sejarah kebudayaan animisme, kepercayaan dan agama serta politik. Modal ini terejawantah melalui perangkat simbol kolektif, berupa benda-benda budaya, adat-istiadat, berbagai falsafah hidup dan kearifan lokal, serta berbagai ekspresi kesenian kontemporer. Permasalahan atas akses pada kapital budaya yang dahulu terbatas pada pekerja dan penikmat budaya serta pengelolaan sumber pusaka budaya oleh kelompok pekerja teknis di departemen milik pemerintah menjadikan lemahnya kesadaran masyarakat mengenai modalitas ini. Sejalan dengan proyek nasionalisme (dalam kacamata politis), sistem pendidikan malah menghasilkan sumber daya manusia di Indonesia yang miskin budaya dan miskin informasi sejarah. Padahal, modal budaya Indonesia

⁴Pakar *nation branding* Simon Anholt, dalam publikasi tahunan *Anholt Nation Brands Index 2005* memasukkan Indonesia sebagai salah satu dari 35 negara yang diranking brand-nya. Dari enam kategori penilaian *tourism, exports, people, government, culture and heritage*, serta *investment and immigration*, Indonesia menunjukkan nilai yang rendah pada hampir semua sektor. Yang menarik adalah simpulan yang diperoleh mengenai budaya masyarakat Indonesia yang terbuka dan ramah serta keindahan alam dan warisan budaya Indonesia bagi dunia. http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html/docs/NBI_Q4_2005.pdf

terlalu kaya untuk diabaikan begitu saja. Jalinan perjumpaan tradisi budaya besar antar-agama dan antar-peradaban, melalui cara-cara damai maupun perang menjadikan pentingnya memasukkan unsur budaya dan kesejarahan sebagai modalitas bangsa ini. Strategi kebudayaan nasional, harusnya bisa mengakomodasi kepentingan narasi kecil (beragam unsur budaya lokal) yang menghidupi wacana nasionalisme sebagai payung budayanya. Kesadaran kebudayaan sebagai bagian dari proyek nasionalisme tidak akan bisa dicapai, bagaimana pun, tanpa kesadaran politik dan sejarah pascakolonial.

Mengutip Edy Sedyawati (KOMPAS, 10 Februari 2007), seorang ahli kebudayaan bernama Miguel Leon-Portilla dalam bukunya, *Endangered Cultures* (1990), menyatakan bahwa bangsa yang tidak memiliki kesadaran sejarah akan lemah dan mudah dijajah. Kesadaran sejarah yang dimaksud adalah mengetahui fakta-fakta sejarah yang benar dan mengenali kesejatan asal muasal bangsanya serta ke mana arah tujuannya. Seseorang yang telah memiliki kesadaran sejarah diindikasikan dari kemampuannya membedakan fakta sejarah sebagaimana direkam (melalui penelusuran historiografis yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) dan fakta yang hendak dipercaya (termasuk di dalamnya fiksi kesejarahan yang banyak dieksplorasi oleh para seniman sesuai wilayah kreasinya).

Kapital intelektual mengacu pada individu atau kelompok kreatif, baik di pusat maupun di daerah, juga karya-karyanya yang berhasil menciptakan energi dan ruang hidup kebudayaan di masanya melalui pemikiran maupun kerja kreatifnya. Kapital intelektual negeri ini mencakup wilayah pemikiran dan *interest* atau *concern* yang beragam, dan dipengaruhi oleh *episteme* di masanya. Simpulan bahwa bangsa Indonesia termasuk kelompok homo-laden yang hanya bisa menjadi konsumen pasif harusnya ditingkahi dengan laku kreatif untuk mengatasinya. Apriori pada bangsa sendiri harusnya menjadi basis dari titik kesadaran yang sublim.

Saat ini kita mengalami proyek Grameen Bank Muhammad Yunus yang mengantarkan Bangladesh sebagai negara berkembang, padahal bangsa kita bisa juga menerapkan hal yang sama melalui eksplorasi pemikiran Muhammad Hatta. Contoh lain: Indonesia, sama seperti India, memiliki pengalaman kolonisasi dan dekolonisasi, namun pengakuan atas perkembangan studi pascakolonial dibangun di seputar kesadaran dan suara subaltern India.

Proyek nasionalisme budaya bisa dilakukan dengan cara memperkenalkan tradisi intelektual

untuk menumbuhkan kebanggaan, kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa, serta pengenalan identitas dan jati diri bangsa melalui bingkai pembelajaran tradisi intelektual bangsa ini. Bangsa Amerika, misalnya, memperkenalkan tradisi intelektual bangsanya kepada generasi muda melalui *course American Intellectual Tradition*. Dalam *course* ini, seseorang diajak untuk melihat genealogi sejarah sosial dan budaya bangsa Amerika: bagaimana sebuah pemikiran berkembang dari satu masa ke masa yang lain, apa yang mengilhami pemikiran tersebut dan bagaimana pemikiran tersebut memberi makna atas keberadaan realitas kolektifnya hari ini. Budaya yang muncul dari proses pembelajaran ini adalah berkembangnya nalar sosial seseorang untuk mampu berempati pada kenyataan: realitas tidak dinilai dalam dikotomi benar-salah, hidup tidak dinilai dalam oposisi baik-buruk, seseorang tidak dinilai dari catatan pendosa/ahli surga, tapi dilihat dalam kompleksitasnya yang manunggal dan proporsional.

Eksplorasi kapital intelektual di Indonesia, karenanya, menjadi salah satu jalan untuk merekonstruksi sejarah sosial bangsa ini serta merehabilitasi moral dan mental masyarakat. Hingga hari ini mitos pahlawan bangsa adalah mereka yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Konsepsi ini jelas mematikan potensi untuk melahirkan laku kepahlawanan yang kreatif dan kontekstual di masa kini, yang tidak lagi berorientasi perjuangan fisik anti-kolonialisme; akan tetapi juga anti-kebodohan, anti-kemiskinan, anti-penindasan, dan sebagainya. Eksplorasi kapital intelektual bukanlah proyek elitis yang memberi tekanan berlebih atas peran kaum intelektual yang eksklusif; melainkan proyek populer di mana setiap orang dituntut untuk memberi arti kehadiran dirinya melalui manfaat sosial yang dibangun bagi lingkungannya.

Field: Perjuangan Simbolik dalam Ranah Diplomasi RI

Semakin banyak aktor yang terlibat tindak wacana dan komunikasi saat ini menyebabkan pertarungan simbolik dalam konteks diplomasi terjadi di dalam maupun di luar negeri. Pertarungan simbolik didasarkan atas adanya perbedaan pandangan dunia, nilai-nilai ataupun sudut pandang. Di dalam negeri perjuangan simbolik saat ini mewujud dalam beragam isu dan fenomena seperti *clean government*, tuntutan pemekaran wilayah, kebebasan informasi, sistem pendidikan nasional, penanganan bencana dan

kerusakan lingkungan, penegakan HAM, kebijakan ekonomi sentralistis/desentralistis, pemberantasan kejahatan transnasional, sistem hukum dan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Di luar negeri perjuangan simbolik saat ini mewujud dalam agenda *good governance* dan penciptaan keamanan internasional dalam arti luas.

Dikarenakan melibatkan nilai-nilai, proses pertarungan simbolik menjadi tidak pernah lepas dari *vested interests*. Struktur ekonomi Indonesia yang timpang dan sejarah penindasan dalam konstruksi kelas sosial berkelindan dengan sentimen etnisitas, gender, agama dan warisan sistem kolonial mengerangkai basis perjuangan dan kekerasan simbolik yang dihadirkan. Konstruksi sosial dalam relasi etnis, gender dan keberagamaan di Indonesia terbukti banyak melahirkan kontras dan konflik, meski tak jarang faktor ekonomilah yang sesungguhnya menjadi katalisator konflik yang terjadi. Sifat transendensi agama bahkan kerap dihadirkan sebagai basis justifikasi dan kacamata tunggal yang digunakan untuk menilai dan memutuskan baik/buruk, adil/tidak adil, dan boleh/tabu.

Kompleksitas kondisi ini menggambarkan skema persepsi, kerangka pikir dan pola tindakan masyarakat Indonesia. Penilaian terhadap politik luar negeri AS, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari sikap politik AS terhadap kolonisasi tanah Palestina oleh Yahudi Israel. Kebijakan luar negeri AS juga dipersepsikan sebagai kebijakan *gagah-gagahan* (baca: maskulin) yang mengedepankan kekerasan serta mengonstruksikan secara biner oposisi Barat vs Timur. Secara khusus, kerangka pikir ini menjadi acuan kecenderungan sikap aktif maupun reaktif bangsa Indonesia dalam merespons kondisi obyektif bangsa. Demonstrasi menentang kehadiran MNC, kunjungan Bush, privatisasi BUMN, penambahan utang luar negeri, hingga Resolusi DK PBB mengenai Iran, misalnya, tidak lepas dari disposisi kognitif dan somatis yang terbentuk dari kondisi ini (*habitus* dalam istilah Bourdieu).

Habitus & Symbolic Strategy: Habitus dan Strategi Simbolik Diplomasi RI

Habitus mengurai jalinan struktur sosial yang mengondisikan bangsa ini. *Habitus* pada dasarnya lahir dari dialog yang muncul melalui proses dua arah: obyektifikasi subyektif dan subyektifikasi obyektif. Obyektifikasi subyektif hadir melalui pola-pola pewarisan orientasi nilai dan sikap seseorang

yang difungsikan sebagai struktur obyektif dari realitas yang terdefiniskan, sedangkan subyektifikasi obyektif menarik masuk pengaruh baru yang datang belakangan, untuk memperkuat struktur yang telah ada atau sebaliknya malah mendistorsinya.

Habitus diplomasi Indonesia, bagaimana pun juga, tidak bisa dilepaskan dari konsep politik bebas-aktif yang terikat dengan konteks kesejarahan pasca-kolonial, cita-cita kemerdekaan dan hasrat berdaulat dari segala bentuk penjajahan. Dalam kenyataannya, konteks kesejarahan pascakolonial membawa implikasi ganda kompleks inferioritas dan semangat kelahiran kembali. Di sinilah letak tantangan dan substansi bagi arah strategi atau perjuangan simbolik diplomasi Indonesia.

Menerjemahkan Bourdieu, Haryatmoko (2003) mendefinisikan strategi investasi simbolik sebagai upaya mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial, tujuannya untuk mereproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekuasaannya. Selain itu, strategi ini juga mencakup tujuan pembalikan negatifitas (degradasi atau defisit simbolik) dalam pencitraan menjadi positif (kekuatan simbolik) melalui rekayasa daya-daya produktif dan kreatif modalitas simbolik bangsa ini.

Dalam konteks diplomasi, capaian diplomasi Indonesia dalam kerangka *public diplomacy* (diplomasi publik) telah dilakukan melalui, di antaranya, *Global Intermedia Dialogue* (Bali, 2005) dan dukungan Indonesia bagi *interfaith dialogue*. Selain itu, peran aktif Indonesia dalam proses perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan perdamaian atau pelibatan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik-konflik regional, seperti konflik gerakan separatis Moro di Filipina, menunjukkan legitimitas terhadap simbolitas Indonesia dalam konteks perdamaian. Di lain pihak, pemerintah gagal menekankan prinsip *confidence-building* dengan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura, secara seimbang justru karena pasifisme tindakan luar negerinya yang membuka kesempatan negara lain menempatkan Indonesia dalam posisi kawula.

Sejumlah permasalahan yang muncul dari relasi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura sebenarnya bisa memberi gambaran mismanagemen aset kapital simbolik bangsa ini, seperti pengelolaan jalur laut dan pencurian karya cipta budaya lokal. Lemahnya kesadaran sejarah dan penghargaan atas perjuangan diplomasi kabinet Juanda, di samping ketidak mampuan untuk mengedepankan prinsip keadilan di atas prinsip perdamaian kolektif kawasan dari pihak pemerintah ataupun prinsip

ekonomi yang mengedepankan hak setiap individu untuk memperkaya diri sendiri dari pihak swasta, merupakan awal dari permasalahan yang timbul berkenaan dengan penerapan prinsip perbatasan wilayah Indonesia, termasuk juga masalah penjualan pulau-pulau di kawasan Nusa Tenggara. Sementara itu, lemahnya penghargaan atas karya seni dan budaya dari pemerintah maupun dari masyarakat merupakan sumber dari pengambilalihan karya cipta budaya negeri ini. Hal yang sama juga bisa dilihat dari pengabaian atas kerja kreatif Pramudya Ananta Toer dan pencurian sejarah kehidupannya oleh pemerintah Indonesia yang berkorelasi terhadap kegagalannya (dan kegagalan Indonesia) mendapatkan nobel di bidang literatur, meski hampir setiap tahun namanya dinominasikan⁵ (BASIS, 2006: 34-41).

Bercermin dari uraian di atas, sebenarnya tampak bahwa *image-building* justru pertama-tama harus dibangun dari dalam diri sendiri. Inilah tantangan yang harus disadari dan dilakoni guna mengefektifkan kapital simbolik bangsa ini. Termasuk di antara tantangan itu adalah bagaimana mengubah *habitus* bangsa ini melalui eksplorasi etos Islam yang toleran (bukan *violent*); penghayatan proses demokratisasi melalui peningkatan *trust* serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan simpati; penghargaan atas kemajemukan narasi-narasi kecil di Indonesia melalui apresiasi kearifan lokal dan kesenian subkultur; peningkatan harga diri melalui peningkatan kesadaran kesejarahan; dan menjadi agen dari proses pembiakan kebanggaan personal dan kolektif melalui sikap hidup positif dan kritis.

Strategi investasi simbolik dalam penerapannya tidak bisa memisahkan pelaku negara dan non-negara. Dukungan terhadap rekonstruksi politik luar negeri Indonesia tidak bisa dilakukan melalui kritik tak berkesudahan dan tanpa penyelesaian, melainkan dengan memposisikan setiap orang sesuai dengan *habitus* dan modal yang dimilikinya untuk berperan serta dalam mengartikulasikan prinsip ‘bebas dan aktif’ dalam tindakan kita.

Bagi pemerintah, *image-building* tidak bisa mencapai hasil yang maksimal hanya dengan mengandalkan diplomasi publik di luar negeri tapi juga diplomasi publik di dalam negeri. Selanjutnya, aktivitas diplomasi publik di dalam maupun di luar negeri bisa dimaksimalkan melalui aktivitas informal yang dilakukan dengan pemanfaatan ruang publik. Itu berarti, pemerintah harus aktif membangun kerjasama dengan pihak swasta, seperti kelompok

pekerja dan industri budaya, kelompok pendidikan, produksi perdagangan dan jasa, serta kelompok minat/hobi dan komunitas independen lainnya.

Bekerjasama dengan lembaga kesejarahan, seni budaya dan pariwisata, pemerintah bisa menginisiasi program penelusuran jejak pemikiran intelektual di Indonesia, merevitalisasi pokok-pokok pemikiran yang relevan melalui *project-based competition*, publikasi buku dan promosi penerjemahan (kolaborasi dengan kelompok usaha penerbit buku) di luar negeri. Bekerjasama dengan lembaga seni budaya dan pariwisata, pemerintah juga bisa menghidupkan tradisi lokal melalui festival kraton nusantara, festival wayang nusantara, festival makanan tradisional atau seni kuliner Indonesia, dan festival batik/tenun nusantara. Dengan komunitas lingkungan pemerintah bisa melakukan kampanye hijau; dengan kelompok pengkajian kesejarahan atau investor swasta dalam negeri pemerintah membuka kesempatan pengelolaan museum oleh pihak swasta; dengan komunitas film/hobi/seni pop/seni kontemporer pemerintah menyelenggarakan festival film atau seni pop dan kontemporer Indonesia lainnya; dengan komunitas budaya lokal, komunitas pendidikan dan *stakeholder* jasa wisata mendukung kegiatan rekonstruksi sejarah kota-kota (kampung-kampung, komunitas/diaspora) di Indonesia. Seluruh proses ini memerlukan apresiasi, dukungan dan pelibatan dari masyarakat pada umumnya dan media sebagai sang pembawa pesan. Beragam kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan, di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka ‘menciptakan’ dan ‘membiakkan’ opini sebagai gugus kekuatan simbolik mengenai Indonesia yang plural.

Bourdieu (dalam Piliang, 2005) menjelaskan kekuatan simbol dalam konteks beroperasinya sebuah mekanisme kekuasaan tertentu di balik sebuah simbol. Simbol memiliki kekuatan dalam mengonstruksi realitas yang mampu menggiring orang untuk percaya, mengakui dan bahkan mengubah pandangan mereka tentang entitas yang diwakilinya. Kekuatan simbol mampu mengubah persepsi masyarakat tentang realitas yang sesungguhnya karena simbol memiliki logikanya sendiri, yakni logika simbol.

Logika simbol bekerja secara abstrak melalui semacam kekuatan informasi atau budaya (*meme*) yang merepresentasikan makna tertentu. Di sinilah konstruksi *image* negara berhampiran dengan prinsip bekerjanya kekuatan simbolik pada sebuah

⁵ Adalah Hans Teeuw, seorang Indolog asal Belanda, yang memperjuangkan nama Pramudya Ananta Toer sebagai nominator hadiah nobel internasional

bangsa. Bagaimana pun juga, kompetensi kekuatan simbolik Indonesia baru bisa mencapai hasilnya jika ketiga elemen diplomasi saat ini pemerintah, masyarakat dan media mendukung legitimitas pesan yang digulirkan melalui praktik dan wacana di atas. Di sinilah hakikat dari seluruh upaya rekonstruksi kekuatan simbolik bagi kegiatan diplomasi yang diterapkan melalui investasi dan kultivasi modal simbolik.

Penutup

Masalah rekonstruksi *image* melalui diplomasi untuk kepentingan *branding* bisa dicapai melalui investasi kapital dan strategi simbolik yang efektif, yakni yang melibatkan partisipasi dari pemerintah, masyarakat dan media secara bersamaan. Identifikasi atas kapital dan strategi simbolik Indonesia bisa dilakukan dengan menerapkan pendekatan FIPH dari Pierre Bourdieu.

Pendekatan FIPH mengelaborasi peran *power* melalui daya-daya simbolik yang bersifat produktif (kekuatan simbolik). Kekuatan simbolik diaktivasi dari modal simbolik melalui strategi dan investasi (produksi dan reproduksi), yang terikat dengan praktik dan ranah. Modal simbolik Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam tiga jenis: (1) Islam, (2) Demokrasi, dan (3) Modal Budaya (terdiri atas modal budaya dan pusaka serta modal intelektual). Modal simbolik tersebut hadir sebagai potensi daya yang mendukung konstruksi sejarah dan identitas bangsa Indonesia dalam relasi internasionalnya. Pada akhirnya, aktivasi modal simbolik mensyaratkan partisipasi aktif (*agency*) dari tiga aktor dalam tatanan masyarakat demokratik pemerintah, masyarakat dan media. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir dari pendekatan FIPH dalam tulisan ini, yakni untuk melahirkan praktik-praktik sosial yang bermakna politis dan mendukung gagasan ideal diplomasi bebas aktif Indonesia.

Menjalankan diplomasi yang berorientasi *branding* memerlukan tidak hanya aplikasi teknik marketing yang bersifat kemasan, tapi juga investasi dan strategi simbolik yang kadang menuntut perubahan paradigma. Paradigma itu diperlukan untuk menata skema persepsi, pola pikir dan sikap kita, yang berakhir pada bagaimana kita ingin mengelola daya-daya simbolik dan mengonstruksikan diri sendiri. Kekuatan logika simbolik bekerja secara kolektif; ia menjadi berarti jika dianggap legitim. Dukungan dan peran serta seluruh pihak diperlukan untuk menciptakan opini dan *image* positif di luar negeri. Kunci transformasi, bagaimana pun juga, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kesadaran akan

hal ini akan mengantarkan setiap orang menjadi agen dari, dan bertanggung jawab atas, peran-peran diplomasi yang dijalankannya.

Daftar Pustaka

- Appadurai, A. (2002) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In: J.X. Inda & R. Rosaldo (eds). *The Anthropology of Globalization: A Reader*. Oxford: Blackwell Publishers. 46-64.
- Gordon, Colin (ed.), 1980, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977/Michel Foucault*, Sussex: Harvester Press.
- Haryatmoko (2003) Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa. *BASIS* 11-12 (52):4-23.
- Jenkins, Richard (2004) *Pierre Bourdieu* (terj. *Membaca Pemikiran Pierre Bourdieu*, oleh Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Leander, A. (2006) The 'Realpolitik of Reason': Thinking International Relations through Fields, Habitus and Practice. In: *International Studies Association Annual Convention, 22-25/03/2006, San Diego*. [Diakses 3 Desember 2008]. <http://www.cbs.dk/content/view/pub/38570>.
- Mangunwijaya, Y. B. (1999) *Pasca-Indonesia, Pasca-Einstein: Esei-esai tentang Kebudayaan Indonesia Abad ke-21*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nye, J.S. (1990) *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.
- Piliang, Y.A. (2005) *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Riddell, P.G. (2002) The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Islam and Christian-Muslim Relations* 13 (1):65-84.
- Raillon, F. (1994) The New Order and Islam, Or the Imbroglia and Faith of Politics. *Indonesia* 57 (April 1994):197-217.
- Sedyawati, E. (2007) Histori dan Fiksi: Antara yang Direkam dan yang Dipercaya. *Kompas*, 10 Februari, p.14.
- Soroush, A.K (2002) *Reason, Freedom and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (terj. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*). Bandung: Mizan.
- Steenbrink, K. (2006) Prof. Dr. Hans Teeuw: Post-Kolonialisme dan Rekonstruksi Identitas Indonesia. *BASIS* 11-12 (55):34-41.
- Williams, Raymond (1998) The Analysis of Culture. In: John Storey (ed). *Cultural Theory and Popular Culture*. London: Prentice Hall. 48-56.
- Woodward, M.R. (2001) Indonesia, Islam and the Prospect for Democracy. *SAIS Review* 21 (2):29-37.
- Frost, Randall (2007) Brand America: Taming Wild Perceptions. [Diakses 2 Desember 2008] http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=361.
- The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index* [Diakses 2 Desember 2008] http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html/docs/NBI_Q4_2005.pdf.